



DILEMA KEAMANAN DAN RESPONS KOLEKTIF ASEAN TERHADAP SENGKETA LAUT CINA SELATAN

Yoga Suharman

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas AMIKOM, Indonesia;
email: yoga.shrmn@amikom.ac.id

Abstract

The article aims to explain two dimensions of political-security in the South China Sea. First, the collective response of ASEAN in an effort to maintain security stability in the South China Sea by looking the belief system of interested parties. Second, the configuration of extra-regional power within the sphere of influence in the disputed area. This article uses perception theory and the concept of security dilemma. The data and information of this article obtained from secondary sources which are interpreted to produce descriptive analytical explanations. The article indicates that some of the South China Sea interested parties which are ASEAN members has different belief systems in perceiving security threats that are increasingly complicated by the configuration of extra-regional power.

Keywords: ASEAN, collective responses, perception, security dilemma, South China Sea

Abstrak

Artikel ini bertujuan menjelaskan dua aspek politik keamanan di Laut Cina Selatan. Pertama, peran kolektif ASEAN dalam usaha memelihara stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan dengan melihat pada aspek sistem keyakinan masing-masing negara yang berkepentingan. Kedua, konfigurasi kekuatan ekstra-regional dalam lingkup pengaruh pada kawasan yang dipersengketakan. Analisis dalam artikel ini menggunakan konsep Dilema Keamanan dan teori Persepsi. Data dan informasi dalam artikel ini diperoleh melalui telaah literatur dari sumber sekunder yang diinterpretasikan sehingga menghasilkan penjelasan yang bersifat analitis deskriptif. Artikel ini menunjukkan bahwa sebagian negara penuntut Laut Cina Selatan yang tergabung dalam ASEAN memiliki sistem keyakinan yang berbeda dalam mempersepsikan ancaman keamanan yang semakin diperumit oleh konfigurasi kekuatan ekstra-regional.

Kata Kunci: ASEAN, dilema keamanan, Laut Cina Selatan, persepsi, respons kolektif

Pendahuluan

Laut Cina Selatan adalah jantung geopolitik dan geoekonomi bagi negara-negara di Asia Tenggara (Leifer, 1996: 9). Negara-negara di kawasan ini sangat bergantung pada stabilitas kawasan sebagai jalur pelayaran energi dan sumber produksi. Di kawasan ini, terdapat cadangan minyak dengan jumlah tujuh miliar barel dan diperkirakan 900 triliun kubik gas alam (Kaplan, 2015). Keberadaan sumber-sumber produksi dan jalur perdagangan yang potensial di Laut Cina Selatan menjanjikan pemanfaatan cadangan energi dalam jangka panjang dan pertukaran barang lintas negara di kawasan Asia Timur, Asia Pasifik dan Asia Tenggara.

Sebagai salah satu jalur perlintasan maritim, Laut Cina Selatan memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai transaksi global dengan nilai berkisar \$5 triliun setiap tahun (Brady, 2017). Latar belakang teritori yang melimpah dengan sumber daya produksi memberi peluang Laut Cina Selatan menjadi medan persaingan geopolitik dan geoekonomi strategis (*strategic competition*), tidak hanya bagi negara besar seperti Cina, Jepang dan Amerika Serikat, tetapi juga negara di sekitar kawasan yang seperti Taiwan dan kelompok negara penuntut yang tergabung dalam ASEAN (Bader, Lieberthal & McDevitt, 2014: 3). Berdasarkan kondisi itu, sumber konflik di Laut Cina Selatan dapat dikelompokkan menjadi dua hal. Pertama, persaingan yang dimotivasi oleh penguasaan akses sumber-sumber produksi. Kedua, sengketa teritorial yang terkait dengan kepentingan politik-keamanan negara-negara yang berkepentingan di Asia Tenggara (Christensen, 2005: 25).

Mengingat Laut Cina Selatan merupakan jantung geopolitik dan geoekonomi bagi banyak negara, maka setiap gejala perubahan politik internasional dan munculnya ancaman akan berpengaruh terhadap ASEAN. Dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan, terdapat empat negara anggota ASEAN yang berkepentingan di antaranya: Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, termasuk Indonesia (Firestein, 2019). Negara-negara ini terbagi ke dalam kelompok negara penuntut dan bukan penuntut, namun tetap dinilai memiliki kepentingan. Selain itu, terdapat kekuatan ekstraregional seperti Amerika Serikat yang turut mempengaruhi dinamika politik internasional di Laut Cina Selatan. Klaim Sembilan Garis Putus-putus oleh atau sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan oleh Cina menunjukkan adanya kehendak untuk menguasai wilayah

sengketa. Klaim ini menimbulkan perselisihan negara-negara atas wilayah dan kedaulatan di Laut Cina Selatan.

Berdasarkan perspektif tradisional, semua negara yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan memiliki kesamaan tujuan nasional, yaitu untuk mengamankan kedaulatan teritorial dan memperoleh sumber produksi bagi pertumbuhan dan kepentingan ekonomi domestik. Perkembangan kontemporer di Laut Cina Selatan dan posisi individu anggota ASEAN yang berkepentingan masih dicirikan oleh adanya perbedaan nilai dan sistem keyakinan dalam merespons sengketa Laut Cina Selatan. Pada saat yang sama, hingga tahap pembentukan komunitas ASEAN tahun 2015, komitmen anggotanya untuk membentuk kesepakatan bersama di sektor pertahanan dan keamanan masih belum dapat diwujudkan (Hacke, 2005: 48).

Klaim-klaim yang tumpang tindih dari negara penuntut yang tergabung sebagai anggota ASEAN adalah wujud dari konflik kepentingan multidimensi terhadap Laut Cina Selatan. Cara setiap negara yang berkepentingan dalam mempersepsikan ancaman berpengaruh terhadap sikap ASEAN dalam menyelesaikan sengketa wilayah Laut Cina Selatan secara kolektif. Persoalan ini semakin kompleks ketika Cina relatif berhasil mempengaruhi negara-negara penuntut secara bilateral dan mengesampingkan penyelesaian secara multilateral. Misalnya, dukungan Kamboja terhadap klaim Cina di Laut Cina Selatan berpengaruh terhadap solidaritas organisasi untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan.

Salah satu karakter kerja sama di ASEAN bersifat lunak. Menurut Truong dan Knio (2016), kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh anggota ASEAN identik dengan persepsi individu negara, bukan pada persepsi organisasi secara keseluruhan (Truong & Knio, 2016: 78). Peta kebijakan luar negeri anggota ASEAN jauh dari nilai kolektivisme. Kondisi ini mengafirmasi bahwa sebagian anggota ASEAN yang berkepentingan di Laut Cina Selatan meliputi Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, termasuk Indonesia mempunyai sikap kebijakan luar negeri yang berbeda. Persoalan besar yang dihadapi oleh ASEAN adalah belum adanya norma yang mampu mengikat secara hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk yang tertuang dalam *Declaration of Conduct*. Kondisi ini memberi peluang bagi krisis yang berkelanjutan. Pelanggaran Cina terhadap hasil pengadilan arbitrase internasional merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional dan ASEAN belum dapat

menghasilkan keputusan bersama yang mengikat semua pihak dan menghentikan ekspansi Cina di Laut Cina Selatan (Heydarian, 2018).

Dalam konteks lingkup pengaruh kekuatan ekstraregional, persaingan pengaruh Amerika Serikat dan Cina memiliki tujuan yang lebih jauh, yaitu kehendak untuk menjadi kekuatan hegemonik di wilayah ini (Alatas, 2016: 34). Masalah solidaritas dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan menjadi tantangan jangka panjang bagi ASEAN untuk memelihara stabilitas kawasan sekaligus menghindari dominasi eksternal yang berasal dari Cina. Berdasarkan hal ini, muncul pertanyaan mengapa ASEAN belum mampu mengambil peran strategis dalam memelihara stabilitas kawasan di Laut Cina Selatan secara kolektif?

Kerangka Konseptual

Dilema Keamanan

Teori dilema keamanan (*security dilemma*) dipergunakan oleh ilmuwan Hubungan Internasional untuk mendeskripsikan tentang dinamika keamanan kawasan. Dilema Keamanan dalam Hubungan Internasional digambarkan sebagai keadaan di mana tindakan yang diambil oleh negara yang memperkuat sistem pertahanan dan keamanannya sangat mempengaruhi reaksi negara lain untuk mengambil tindakan defensif sekaligus menciptakan kemitraan strategis bersama negara lain yang lebih kuat.

Pada sisi lain, dilema keamanan juga berpotensi memicu tingkat persaingan yang tinggi dan menggambarkan dinamika umum tentang konflik dan usaha negara untuk memelihara perdamaian (Thu, 2018). Dalam konteks keamanan kawasan, dilema keamanan juga menggambarkan bagaimana sebuah dinamika politik internasional dapat memicu persaingan dan konflik di suatu kawasan (Jervis, 2017: 167-174). Selanjutnya, Jervis menyatakan bahwa konsep dilema keamanan merupakan suatu kondisi dimana kebijakan keamanan suatu negara dapat berpotensi untuk melemahkan kebijakan keamanan negara lain (Jervis 1978 dikutip Scrafton, 2016).

Dalam sistem internasional yang anarkis, ketidakpercayaan antara dua atau lebih negara dapat menentukan posisi masing-masing pihak untuk mengambil tindakan yang ofensif. Ketegangan kawasan dapat dipengaruhi oleh tingkat bahaya yang dimunculkan oleh suatu negara terhadap yang lain. Konsep dilema keamanan dipergunakan untuk menganalisis sengketa Laut Cina Selatan mengenai persaingan dan konflik yang

dinamis. Setiap negara yang dicurigai sebagai ancaman ofensif dapat memicu reaksi yang sama bagi negara yang berada di sekitar kawasan (Christensen, 2003: 26). Konsekuensinya adalah persaingan dan konflik keamanan berpotensi menjauhkan setiap negara untuk mencapai kesepakatan bersama.

Teori Persepsi

Persepsi pemimpin pemerintahan terhadap sebuah situasi internasional dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri terhadap lingkungan eksternal. Franck dan Weisband berlangsung (dalam Mas'oed, 1990: 19), misalnya, menyatakan bahwa cara dua negara saling melihat satu sama lain dan memandang persoalan eksternal seringkali menentukan cara mereka berinteraksi. Pilihan negara untuk menjalin kerja sama bilateral dan multilateral tergantung pada bagaimana cara negara menilai perubahan politik internasional yang sedang. Persepsi dibedakan menjadi tiga komponen yang terdiri dari nilai, keyakinan dan kognisi. Nilai merupakan preferensi realitas negara terhadap yang lain. Keyakinan merujuk pada deskripsi terhadap realitas yang diperoleh dari proses penerimaan dari lingkungan eksternal. Kognisi merujuk pada pengakuan terhadap lingkungan eksternal (Jones & Rosen 1982: 212-213).

Persepsi negara merupakan salah satu objek yang akan diteliti dalam sengketa Laut Cina Selatan dengan cara mengidentifikasi sistem keyakinan antarnegara terhadap lingkungan eksternal (Mas'oed, 1990: 20). Perbedaan persepsi yang meliputi nilai dan sistem keyakinan dalam merespons sengketa Laut Cina Selatan menghadirkan kompleksitas bagi negara di kawasan Asia Tenggara untuk merumuskan kebijakan kolektif. Persepsi mendeskripsikan tentang bagaimana suatu negara mempersepsikan ancaman yang bersumber dari lingkungan eksternal dan keyakinan yang terbentuk terhadap tindakan negara lain. Teori persepsi dalam penelitian ini digunakan untuk menilai bagaimana sistem keyakinan anggota ASEAN yang berkepentingan terhadap Laut Cina Selatan dalam memandang aksi dan reaksi negara lain dalam sengketa Laut Cina Selatan.

Metode Riset

Artikel ini merupakan luaran penelitian yang menggunakan metode kualitatif dalam proses pengumpulan data dan informasi yang bersifat analitis-deskriptif mengenai pemahaman yang bersifat kompleks dengan membangun hubungan antara fenomena

konflik dan persaingan di Laut Cina Selatan, konsep dilema keamanan dan teori persepsi tentang sistem keyakinan dari negara dan organisasi ASEAN sebagai unit analisis yang diteliti. Pengumpulan data menggunakan *literature research* untuk memperoleh data-data sekunder yang bersumber dari buku, media cetak, jurnal, artikel online, pernyataan resmi dan dokumen kebijakan luar negeri para pihak yang berkepentingan. Pengolahan data dalam penelitian ini menghasilkan pembahasan yang bersifat analitis-deskriptif yang diperoleh dari hasil interpretasi terhadap informasi dan data yang telah diperoleh sebelumnya.

Analisis dan Diskusi

Pragmatisme Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara penuntut dalam sengketa Laut Cina Selatan. Kepentingan Malaysia, sebagian besar, dimotivasi oleh akses terhadap sumber daya dan keamanan ekonomi domestik. Namun, aspek yang lebih mendasar terhadap klaim Malaysia yang berakar dari konsepsi normatif tentang negara-bangsa pasca-Westphalian dan prinsip-prinsip kedaulatan, aspek geografis dan integritas teritorial (Noor, 2017: 207; Cordner, 1994 dikutip Ahmad & Sani, 2017: 74). Malaysia mengklaim empat belas fitur maritim yang diduduki oleh militer Malaysia di sekitar kepulauan Spratly, di antaranya: Terumbu Mantanani, Terumbu Ubi, Terumbu Layang-Layang, Terumbu Laya, Terumbu Siput, Terumbu Peninjau, Pulau Amboyna Kecil, Terumbu Perahu dan Terumbu Laksamana. Enam fitur pertama telah diduduki Malaysia dan sisanya diduduki oleh Vietnam dan Filipina. Selain itu, ada fitur maritim dalam kelompok Kepulauan Spratly yang tidak berpenghuni, namun diduga telah berada di bawah kendali administratif pemerintahan Malaysia di antaranya Terumbu Semarang Besar Barat, Gugusan Beting Raja Jarum, Terumbu Semarang Barat Kecil, Gugusan Beting Patinggi dan Beting Serupai (Ahmad & Sani, 2017: 72).

Dalam upaya menegaskan klaim kedaulatannya atas maritim yang diperebutkan, secara diam-diam, Malaysia melakukan berbagai aktivitas di sejumlah wilayah tersebut dengan mengerahkan kapal-kapal perang kecil dan personel militer serta bendera Malaysia untuk menegaskan posisinya dari negara penuntut lainnya. Malaysia telah memiliki landasan pacu untuk pesawat C-130 di Swallow Reef (Cobus, t.t). Dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina, Malaysia cenderung mengadopsi kebijakan

luar negeri yang pragmatis dalam merespons agresifitas Cina di wilayah sengketa (Ahmad & Sani, 2017: 69-71) – meminjam terminologi Parameswaran – sebagai pendekatan “*playing it safe*” (Parameswaran, 2016: 375). Malaysia tidak secara terbuka memusuhi Cina sebagaimana yang dilakukan oleh negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam. Sampai sejauh ini, tindakan Malaysia belum sampai pada tahap konflik diplomatik dengan Cina atas persaingan kedaulatan dan klaim teritorial yang dipersengketakan.

Sikap Malaysia yang cenderung terlihat “lunak” disebabkan oleh adanya manfaat ekonomi yang diperoleh dari hubungan bilateral dengan Cina. Selama enam tahun berturut-turut ekonomi domestik Malaysia mengalami peningkatan signifikan atas kerja sama perdagangan dengan Cina. Malaysia cenderung menggunakan pilihan rasional sebagai landasan kebijakan keamanan di Laut Cina Selatan. Kebijakan luar negeri Malaysia diarahkan untuk menghindari konflik yang konfrontatif sekaligus bentuk diplomasi “diam-diam” (Parameswaran, 2016: 376). Oleh karena itu, Malaysia dapat dipandang sebagai aktor rasionalis dan pragmatis yang dimotivasi untuk memperoleh insentif ekonomi yang lebih besar dari Cina. Kebijakan luar negeri Malaysia cenderung mengarah pada keberlanjutan atas kemakmuran ekonomi dan pembangunan domestik dibandingkan dengan fokus terhadap keamanan kawasan.

Perspektif Filipina dan Inkonsistensi Sikap Luar Negeri

Konfigurasi geografis Filipina terdiri dari lebih dari 7.100 pulau dan berada pada lokasi yang strategis di persimpangan jalur perairan utama yang meliputi Samudra Pasifik, Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan. Negara ini memanfaatkan perairan dan pesisir untuk pertukaran barang dan masyarakat dalam negeri. Atas dasar ini, Filipina membentuk sebuah “Doktrin Kepulauan” dan menjadikan lingkungan maritim sebagai identitas nasional. Sebagai salah satu negara pesisir di wilayah Laut Cina Selatan, Filipina memiliki kepentingan yang sejak lama di kawasan ini, dan pulau-pulau, perairan dan sumber daya laut yang paling dekat dengan kepulauan utama negara tersebut. Laut Cina Selatan penting bagi Filipina untuk menjadi teritori keamanan dari ancaman eksternal (Baviera, 2017: 161-162).

Garis komunikasi laut (*Sea Lines of Communications - SLOCs*) yang melewati Laut Cina Selatan menopang Filipina dalam hubungannya dengan transportasi dan ekonomi seluruh dunia. Filipina memanfaatkan 25 persen sumber daya laut di wilayah

Barat Kepulauan Palawan untuk produksi pangan dalam bidang perikanan. Pada bagian pesisir sebelah barat menghadap Laut Cina Selatan, yang langsung berbatasan dengan sebelas provinsi yang menyebabkan konflik atau tensi di masa lalu dengan negara lain, termasuk sejumlah fitur Kepulauan Spratly (Baviera, 2017: 162). Negara-negara ini meliputi: Jepang, Taiwan, Malaysia, Vietnam dan Cina.

Berdasarkan hal ini, Filipina mengklaim Kepulauan Spratly sebagai bagian dari negaranya dengan nama Gugusan Pulau Kalayan. Fitur maritim ini menjadi bagian dari kepentingan Filipina sebelum kemerdekaan tahun 1946. Pada tahun 1970-an, cadangan minyak dan gas bumi mulai ditemukan di landasan kontinental Filipina. Sejak tahun 1974-1975, setelah Cina merebut pulau-pulau yang diduduki Vietnam di Paracel, Hanoi mulai menduduki fitur di Kepulauan Spratly. Tindakan ini memicu ketegangan antara Filipina dan Vietnam. Pada 2011, Filipina pernah mengusulkan kepada ASEAN untuk mengembalikan Laut Cina Selatan sebagai zona perdamaian, kebebasan, persahabatan dan kerja sama. Namun, upaya tersebut tidak cukup berhasil menyatukan pandangan negara penuntut *versus* non-penuntut di Asia Tenggara. Sampai sejauh ini, Filipina masih berupaya untuk membendung agresivitas Cina di Laut Cina Selatan sekaligus mempertahankan hubungan luar negeri dengan Cina.

Dasar pertimbangan Filipina untuk mempertahankan wilayah yang diklaim adalah penegakan terhadap kedaulatan teritorial dan memanfaatkan sumber-sumber produksi dari persediaan minyak dan gas di Reed Bank. Meskipun sejumlah negara penuntut telah melangsungkan hubungan ekonomi dengan Cina, tetapi Filipina tetap mencurigai peningkatan postur kekuatan militer Cina di Laut Cina Selatan. Dalam konteks ini, Filipina menerapkan “standar ganda” untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi sekaligus mempertahankan dominasinya terhadap Cina. Pada 2013, Filipina merilis pernyataan resmi dan lampiran dokumen kebijakan yang menentang keberadaan Cina di wilayah yang diklaim sebagai milik Filipina.

Dalam pernyataan resmi ini dinyatakan tentang sikap dan posisi hukum Filipina atas wilayah sengketa. Berdasarkan pernyataan resmi tersebut, memperlihatkan dua sikap tegas Filipina terhadap Cina. Pertama, klaim sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) oleh Cina bertentangan dengan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS). Kedua, Cina telah mengganggu implementasi hukum laut di zona laut Filipina yang sah. Dalam konteks ini, Filipina memproyeksikan agenda keamanan luar negeri dengan dasar keyakinan terhadap kedudukan hukum internasional dan

menganggap Cina telah mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif serta mengancam kebebasan navigasi di Zona Ekonomi Eksklusif (GBTimes, 2016).

Kebijakan luar negeri setiap negara juga dipengaruhi oleh nilai yang dimiliki oleh kepala pemerintahan, dalam hal ini, adalah Presiden. Pada saat kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, arah kebijakan luar negeri Filipina mengalami perubahan drastis. Pada tahun 2018, Filipina mengubah keputusannya untuk mengikuti kehendak dari Cina dengan tidak mengibarkan Bendera Filipina di pulau-pulau yang dipersengketakan (Mourdoukoutas, 2019).

Brunei Darussalam: “The Silent Claimant State”

Brunei Darussalam adalah negara penuntut yang tidak secara terang-terangan mengklaim teritori Kepulauan Spratly. Klaim yang diajukan Brunei kepada adalah Louisa Reef. Dasar pertimbangannya, Louisa Reef berada di landasan kontinental Brunei; alasan yang juga digunakan oleh Malaysia, Cina dan Vietnam untuk mengklaim salah satu fitur di Kepulauan Spratly (Roach, 2014: ii). Meskipun demikian, Brunei Darussalam merupakan negara penuntut yang tidak terlalu intensif dalam merespons sengketa Laut Cina Selatan.

Adapun alasan mengapa Brunei cenderung defensif terhadap Cina adalah akibat kondisi domestik yang sedang mengalami resesi ekonomi. Negara ini dapat dikatakan gamang dalam merespons masalah Laut Cina Selatan, mengingat Cina terus melakukan upaya diplomatik secara bilateral kepada Kesultanan Brunei agar merelakan wilayah yang dipersengketakan. Salah satu upaya Cina untuk mempengaruhi posisi dan sikap luar negeri Brunei terhadap wilayah sengketa adalah dengan cara menawarkan insentif-insentif ekonomi untuk memulihkan kondisi ekonomi domestik sekaligus menciptakan ketergantungan ekonomi Brunei Darussalam.

Intensitas hubungan Brunei-Cina ditunjukkan dalam bentuk dukungan kepada pemerintahan Brunei untuk melanjutkan kebijakan diversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada minyak dan gas. Harga minyak yang rendah telah membuat Brunei berada dalam resesi ekonomi. Menurut Tiezzi (2018), Kesultanan Brunei berkeyakinan bahwa kerja sama dengan dapat memulihkan kembali tatanan ekonomi domestik (Tiezzi, 2018). Meskipun demikian, kerja sama antara kedua negara tidak juga mempengaruhi hak dan klaim maritim masing-masing pihak (Zhen, 2018).

Kesultanan Brunei meyakini bahwa kesediaannya untuk tunduk terhadap kehendak di wilayah Laut Cina Selatan justru dianggap dapat mendukung pemulihan ekonomi dan diversifikasi, mendorong pertumbuhan dan pada gilirannya legitimasi politik pemerintahan dalam negeri. Sebagai negara kecil dalam kelompok penuntut, Brunei relatif menggunakan kekuatan lunak (*soft power*) dalam mengajukan klaim wilayah dan lebih berorientasi pada penguatan kerja sama ekonomi berdasarkan nilai persahabatan, kepercayaan dan kehendak politik yang baik antara keduanya.

Pada kenyataannya, Brunei telah sepakat untuk menjalin kemitraan strategis di bidang ekonomi dan pembangunan serta cenderung mengabaikan masalah yang dihadapi bersama dengan negara penuntut di dalam organisasi ASEAN (Tiezzi, 2018). Upaya Cina ini, secara tidak langsung berpengaruh terhadap pelemahan sikap politik luar Brunei Darussalam dalam masalah Laut Cina Selatan. Konsekuensinya, ASEAN akan menghadapi kesulitan untuk menghasilkan konsensus bersama atas ekspansi Cina di Laut Cina Selatan.

Keyakinan Historis Vietnam

Vietnam adalah negara penuntut mengingat posisi geopolitiknya dan hubungan sejarah dengan Cina. Perbedaan interpretasi wilayah sengketa dengan Cina telah menimbulkan tensi diplomatik antara kedua negara. Pada 2011, terjadi peristiwa pemotongan jalur eksplorasi minyak Vietnam oleh dua kapal nelayan Cina. Cina, kemudian, membantah tindakannya dan justru menuding Vietnam melanggar kedaulatan maritim (Truong & Knio, 2016: 68). Selanjutnya adalah tindakan Cina untuk mendaratkan pesawat pengebom di Pulau Woody yang sama-sama diklaim oleh kedua negara memaksa Vietnam melalui Kementerian Pertahanan, Nguo Xuan Lich untuk mengeluarkan pernyataan protes kepada Cina. Dalam pernyataan tersebut disampaikan bahwa “tindakan yang dilakukan oleh Cina merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain, melanggar hukum internasional, memperumit situasi dan secara negatif mempengaruhi perdamaian, stabilitas dan keamanan regional” (Viray, 2018).

Sikap dan posisi kebijakan luar negeri Vietnam terhadap Cina didasarkan pada hukum internasional dan keyakinan historis untuk membuktikan kedaulatannya atas kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly). Menurut keyakinan historis Vietnam, negara ini menguasai setidaknya 25 struktur batu karang, pasir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Spratly. Pada 2018, Presiden Vietnam semakin mengukuhkan

konsistensinya untuk memperjuangkan kedaulatan dan integritas wilayah berdasarkan nilai-nilai historis yang diyakini oleh pemerintahannya (Doan, 2019; GBTimes, 2016). Sampai sejauh ini, Vietnam sedang berupaya untuk memperkuat posisinya di Laut Cina Selatan dengan mendorong diberlakukannya ketentuan yang tertuang dalam *Code of Conduct (CoC)* di Laut Cina Selatan sekaligus mencari dukungan internasional yang lebih luas. Selama ini, Vietnam menilai bahwa *CoC* belum mengikat semua pihak yang berkepentingan sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran internasional. Oleh karena itu, Vietnam menginginkan bahwa kode etik yang dihasilkan dari *Declaration of Conduct* di Laut Cina Selatan seharusnya dapat mencegah tindakan Cina memperluas pembangunan pulau buatan dan peningkatan aktivitas militer di wilayah yang dipersengketakan.

Keyakinan Vietnam terhadap integritas teritorialnya ditegaskan dengan mengumumkan Hukum Laut pada 21 Juni 2012. Namun, pemerintah Cina melalui *China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)* menanggapinya dengan merilis peta yang menyatakan bahwa sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) di lepas pantai di Laut Cina Selatan telah dijadikan ruang eksplorasi melalui kerja sama dengan perusahaan asing. Sebaliknya, Vietnam mengklaim bahwa aktivitas eksplorasi yang dilakukan Cina berada di Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam. Vietnam terus mendorong kesepakatan dan perjanjian internasional yang mengarah pada usaha untuk membendung ekspansi Cina di Laut Cina Selatan, baik secara independen maupun pelibatan negara anggota ASEAN.

Sampai sejauh ini, Vietnam berupaya untuk mempertahankan kedaulatan teritori dari ekspansi Cina dengan tiga pendekatan. Pertama, mendorong penyelesaian sengketa dalam bingkai internasional dengan melibatkan negara ekstraregional untuk menciptakan perimbangan kekuatan (*balance of power*) di kawasan. Kedua, menempatkan masalah sengketa dalam kerangka penyelesaian secara multilateral untuk memperoleh dukungan diplomatik. Ketiga, mengembangkan kapabilitas militer dengan tujuan untuk menangkis (*deterrence*) potensi konflik terbuka dengan Cina. Namun, perubahan tajam kebijakan luar negeri Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte meningkatkan antisipasi Vietnam sebagai negara ASEAN yang berada di garis terdepan dalam sengketa wilayah dan maritim dengan Cina meskipun harus menghadapi konflik asimetris (Thu, 2018).

Posisi Indonesia: Implementasi Bebas Aktif

Secara teknis, Indonesia bukan merupakan negara penuntut dalam sengketa Laut Cina Selatan. Namun, klaim Cina terhadap sembilan garis putus-putus menjadikan Indonesia sebagai negara yang juga berkepentingan terhadap batas-batas maritim dan zona ekonomi eksklusif di Laut Cina Selatan, khususnya di sekitar Kepulauan Natuna. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan keseimbangan yang lunak (*delicate equilibrium*) yang melibatkan Cina dan aktor-aktor di kawasan sekaligus mengupayakan langkah-langkah strategis di bidang keamanan, hukum dan ekonomi yang dirancang guna melindungi kepentingan nasional (*hard power*) (Parameswaran, 2017).

Sikap Indonesia setelah terjadi perselisihan dengan kapal-kapal Cina adalah dengan mengganti nama Kepulauan Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Hal ini merupakan sinyal politik kepada Cina dan negara lain di kawasan atas posisi Indonesia di kawasan sengketa sekaligus menghormati pertalian dengan Cina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada 2016, Indonesia telah mendaftarkan Laut Natuna Utara ke dalam Organisasi Hidrografi Internasional (*International Hydrography Organization - IHO*) sebagai langkah strategis yang sejalan dengan hukum internasional untuk mengamankan kedaulatan teritorinya dan wujud dari reaksi balasan terhadap agresifitas Cina. Namun, Cina justru menilai bahwa tindakan Indonesia untuk mengganti nama Natuna justru dapat merusak perdamaian dan stabilitas serta mengganggu hubungan Indonesia dengan Cina (Parameswaran, 2017).

Dasar kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Laut Cina Selatan ditempuh melalui doktrin bebas aktif yang mempunyai sisi ganda. Pertama, pemerintah Indonesia tetap menempuh jalur diplomatik dalam mengelola konflik yang terkait dengan klaim sembilan garis putus-putus yang ditetapkan oleh Cina. Kedua, langkah diplomatik yang ditempuh Indonesia terhadap Cina juga bersamaan dengan pengerahan armada tempur di Kepulauan Natuna, termasuk penguatan langkah hukum internasional dan ekonomi. Tindakan Indonesia ditempuh karena adanya cara pandang bahwa negara tetangga di Asia Tenggara yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan dipandang lebih akomodatif terhadap klaim teritorial Cina (Parameswaran, 2017).

Konfigurasi Kekuatan Ekstra-Regional: Amerika Serikat versus Cina

Sengketa teritorial Laut Cina Selatan juga melibatkan pertarungan kekuatan ekstra-regional (Susan & Brand, 2016: 247). Tawar menawar kepentingan cenderung bersifat relatif karena tergantung pada relasi sejarah yang terbentuk dengan kekuatan di luar kawasan pada masa lampau. Amerika Serikat adalah salah satu kekuatan ekstra-regional yang mempengaruhi kontestasi keamanan di Laut Cina Selatan. Sementara itu, elit politik Cina mempunyai kepentingan untuk memperkuat statusnya sebagai kuasa besar (*great power*) di Asia Timur (Li, 2008: 171). Sejak berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC) pada 1949, Cina secara konsisten mengejar tujuan untuk menegaskan klaim kedaulatannya di seluruh wilayah maritim Laut Cina Selatan dalam upaya (Tuan, 2017: 187). Keyakinan politik domestik yang dilegitimasi oleh kepemimpinan Partai Komunis membuat menolak mundur dari Sengketa Laut Cina Selatan. Bagi Partai Komunis, tindakan defensif sama saja dengan menyerahkan kembali kekuatan hegemonik kepada kekuatan yang bersumber dari luar kawasan, yakni Amerika Serikat (Scrafton, 2016).

Dilema ASEAN dalam menentukan kesepakatan kolektif menjadi semakin kompleks ketika melibatkan persaingan antara kekuatan ekstra-regional maupun antara negara kuasa besar. Ketergantungan ekonomi ASEAN dalam *China-ASEAN Free Trade Area* (CAFTA) turut melemahkan ASEAN untuk menekan tindakan provokatif Cina di Laut Cina Selatan. Reaksi terhadap aktivitas Cina tidaklah berlangsung secara kolektif, sehingga memecah kesatuan ASEAN. Pada sisi lain, Amerika Serikat menggunakan negara-negara penyangga (*buffer states*) maupun aliansi di kawasan untuk membendung ekspansi Cina.

Konfigurasi kekuatan ekstraregional merupakan perebutan antar kekuatan hegemoni untuk sama-sama memperoleh penguasaan sumber-sumber produksi dan jalur maritim. Amerika Serikat selalu berupaya untuk mempertahankan posisi unipolar dalam sistem internasional dengan cara memperluas kehadiran militernya hampir di berbagai kawasan dunia, termasuk di Filipina. Pada sisi lain, Cina sedang berupaya untuk mengejar status kuasa besar dan pemeran dominan dalam urusan regional (Li, 2008: 172-173; Qodarsasi & Rachmawati, 2018: 145). Penyebarluasan pengaruh politik Amerika Serikat terhadap negara penyangga dan aliansi strategis (*strategic alliance*) negara-negara di kawasan seperti Jepang dan Taiwan dianggap oleh Cina sebagai

ancaman dan usaha-usaha ofensif untuk menggagalkan kepentingan nasional Cina di kawasan (Firestein, 2016).

Sebaliknya, klaim Amerika Serikat di Laut Cina Selatan merupakan upaya untuk menegaskan tentang pentingnya kebebasan navigasi dan penyeimbangan kembali kekuatannya di Asia tanpa ada satu kekuatan dominan (Poling dan Glaser, 2019). Kenyataan inilah yang kemudian meningkatkan kewaspadaan Cina untuk memperkuat militer dan memperketat kontrol atas wilayah laut dan udara di Laut Cina Selatan terhadap kehadiran kekuatan Amerika Serikat di kawasan (Poling & Glaser, 2019). Oleh karena itu, persaingan posisi kuasa besar antara Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan merupakan masalah yang muncul akibat persepsi strategis terhadap pengelolaan konflik dan sumber daya kawasan.

Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan negara Asia Tenggara didasari oleh pentingnya Laut Cina Selatan bagi kebutuhan pembangunan dan industri nasional yang terus meningkat. Cina tidak khawatir jika harus menempuh konfrontasi dengan negara-negara ASEAN. Pemerintah Cina, baik secara sepihak dan bilateral terus berupaya untuk memanfaatkan persediaan minyak dan gas serta menemukan cadangan energi baru untuk meningkatkan kapabilitas ekonomi nasional di Laut Cina Selatan (Noor, 2017).

Pada sisi lainnya, Amerika Serikat mempunyai proyek pembentukan aliansi strategis dengan sejumlah negara-negara ASEAN dan mempertahankan keyakinannya tentang zona kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Secara perlahan, Amerika Serikat memperkuat kembali aliansi tradisionalnya dengan Filipina, dilanjutkan dengan Vietnam, membangun membangun persekutuan secara *de facto* dengan Singapura, dan bahkan mempengaruhi Kamboja dan Myanmar sebagai negara-negara yang lama terpinggirkan dari radar kebijakan luar negeri Amerika Serikat (Kurlantzick, 2011). Namun, pada 2016, usaha-usaha Amerika Serikat dapat dikatakan belum berhasil karena Cina justru lebih mampu mempengaruhi sebagian negara penuntut yang tergabung di ASEAN secara bilateral melalui insentif ekonomi yang ditawarkan kepada Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina era kepemimpinan Rodrigo Duterte.

ASEAN merupakan mitra kerja sama terbesar Cina dengan total perdagangan sebesar USD 346,4 miliar pada 2015 melalui China-ASEAN Free Trade Area. Kerja sama perdagangan ini menyumbang 15,2 persen dari total keseluruhan perdagangan ASEAN. Investasi Asing Langsung (FDI) yang mengalir dari Cina ke ASEAN

berjumlah USD 8,2 miliar pada tahun 2015, mengukuhkan posisi Cina sebagai sumber investasi luar negeri terbesar keempat di ASEAN (ASEAN Overview, 2017). Ketergantungan ekonomi ASEAN terhadap Cina berpengaruh terhadap bagaimana ASEAN sebagai organisasi menyikapi tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan.

Sejak 2017, Cina semakin meningkatkan aktivitas di Laut Cina Selatan tanpa tekanan berarti dari negara-negara ASEAN. Sejak 2014, Cina telah memperluas wilayahnya hingga 290.000m² atau 72 hektar daratan baru (Nguyen & Than, 2018). Perluasan pulau buatan telah memperkuat kemampuan negara itu untuk mengendalikan sumber-sumber produksi Laut Cina Selatan. Cina telah berupaya keras untuk meluncurkan propaganda besar untuk menghindari penerapan putusan arbitrase internasional tahun 2016 dengan cara menawarkan prospek pembangunan infrastruktur dalam bentuk inisiasi *Belt and Road* sekaligus memberikan tekanan melalui ancaman penggunaan kekuatan yang memaksa. Konsekuensinya, keuntungan ekonomi yang ditawarkan Cina mengurangi tingkat kesepahaman di dalam ASEAN dan sekaligus memberi kesempatan kepada Cina untuk menghindar dari penerapan *CoC*.

Respons Kolektif: Kontradiksi Internal ASEAN

Status Cina sebagai negara besar membuat negara sekitar kawasan relatif lunak terhadap tindakan Cina. Bagaimanapun juga, strategi kebijakan luar negeri Cina sejauh ini dapat dikatakan mampu menjinakkan solidaritas ASEAN. Strategi Cina untuk menginisiasi pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan bilateral dalam bentuk inisiatif *Belt and Road* kepada sejumlah negara anggota ASEAN menjadi faktor yang menyebabkan pelemahan kekuatan kolektif ASEAN dalam membendung ekspansi Cina. Pada tahun 2002, negara-negara anggota ASEAN dan Cina daratan menandatangani Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Indonesia Laut Cina Selatan untuk menjajaki kerja sama sebagai sarana mengelola konflik. Namun, sejumlah negara penuntut menilai bahwa penerapan Deklarasi para pihak bersifat tidak mengikat dan karakter kelembagaan ASEAN yang lunak melemahkan kapasitas organisasi untuk mengkonsolidasikan kepentingan di antara negara-negara anggota (Noor, 2017).

Tantangan untuk menghasilkan konsensus bersama bagi ASEAN memerlukan kekuatan kolektif untuk mencegah perpecahan internal dan ancaman eksternal (Leifer, 1996: 119). Meskipun ASEAN mempunyai kebanggaan dengan mempraktekan diplomasi *ASEAN Way*, namun sejauh ini, belum menunjukkan sikap satu suara dalam

mengelola stabilitas keamanan Laut Cina Selatan (Noor, 2017). Pada kenyataannya, Cina masih terus membangun pulau buatan sekaligus mengerahkan armada militer di wilayah yang dipersengketakan dan ASEAN belum mampu mengambil sikap politik yang tegas terhadap ekspansi Cina secara kolektif. Bahkan, kelompok negara penuntut seperti Filipina sebelum kepemimpinan Duterte dan Vietnam mengalami kekecewaan besar terhadap kemampuan ASEAN untuk mengambil peran kolektif.

Kontradiksi internal ASEAN dalam merumuskan kebijakan bersama tergambar pada bagaimana masing-masing anggota mempersepsikan masalah sengketa dan ancaman terhadap keamanan di Laut Cina Selatan (Schmitt & Mazza, 2011). Pilihan sikap luar negeri Filipina (era Presiden Duterte), Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia pada kenyataannya tidak sejalan dengan kepentingan anggota kelompok negara penuntut yang lain seperti Vietnam jika diletakan dalam kerangka organisasi kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan sikap dan posisi kebijakan luar negeri negara-negara penuntut berdampak bagi munculnya persaingan di dalam tubuh organisasi dan melemahkan kekuatan ASEAN dalam merumuskan kebijakan kolektif. Pada April 2016, Cina telah mencapai konsensus bersama dengan Brunei Darussalam, Kamboja dan Laos bahwa persoalan sengketa Laut Cina Selatan bukan masalah antara Cina dengan ASEAN secara keseluruhan, melainkan persoalan yang dapat diselesaikan secara bilateral diantara negara penuntut dengan Cina (Chanborey, 2016).

Adapun alasan tentang keterkaitan antara perbedaan sikap masing-masing anggota ASEAN dengan kolektivitas ASEAN dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, kontradiksi yang disebabkan oleh perubahan persepsi ancaman di kawasan yang bersifat dinamis. Kedua, masing-masing negara yang telah memperoleh manfaat ekonomi dari Cina lebih memilih untuk menempuh kebijakan luar negeri yang cenderung kooperatif. Konsekuensinya, perbedaan persepsi ancaman dalam merumuskan pilihan kebijakan antara negara anggota ASEAN menimbulkan masalah ketidakseimbangan dalam mengelola akses dan pengelolaan terhadap sumber-sumber produksi di Laut Cina Selatan. Kesenjangan dalam memandang tindakan Cina memunculkan kontradiksi di dalam tubuh ASEAN sendiri untuk mengambil keputusan kolektif.

Bahkan, konflik dan persaingan di Laut Cina Selatan secara perlahan telah mendorong sebagian negara ASEAN yang berkepentingan untuk meningkatkan anggaran pertahanan dalam usaha melakukan modernisasi militer masing-masing. Pada gilirannya, konflik kepentingan menyebabkan peningkatan postur militer antarnegara di

kawasan. Meskipun persaingan kekuatan militer untuk memperoleh hak kedaulatan teritori dan akses sumber produksi dapat dikatakan sebagai strategi defensif untuk menyeimbangkan kekuatan hegemonik, namun sebaliknya justru menimbulkan dilemma bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Persaingan dan pamer kekuatan pertahanan antara negara penuntut yang tergabung dalam ASEAN dan kekuatan ekstraregional menjadi tidak terelakkan.

Simpulan

Pada dasarnya, setiap negara dalam hubungan internasional memiliki perspesi dan sistem keyakinan yang berbeda dalam merespons gejala perubahan dan dinamika internasional. Hal ini berlaku pula bagi negara-negara ASEAN dalam merespons sengketa di Laut Cina Selatan. Masing-masing negara penuntut ASEAN mengadopsi pendekatan kebijakan luar negeri yang berbeda, baik dalam mengambil serangkaian aksi dan reaksi dalam merespons ekspansi kekuatan Cina di Laut Cina Selatan.

Watak fundamental negara yang cenderung mengutamakan kepentingan nasional membuat kerja sama kawasan di bawah tatanan internasional yang anarkis sangat kompleks. Kompleksitas kerja sama kawasan untuk memelihara stabilitas dan keamanan di Laut Cina Selatan dipersulit dengan lemahnya norma dan hukum internasional yang tertuang di dalam *CoC*. ASEAN tampak belum mempunyai kapasitas untuk mengambil peran kolektif sebagai pemelihara stabilitas keamanan regional. Perbedaan persepsi strategis terhadap Laut Cina Selatan menjadikan kawasan ini sebagai medan persaingan di dalam keanggotaan organisasi dan pertarungan antara Amerika Serikat dan Cina serta bagaimana upaya keduanya untuk memenangkan persaingan pengaruh kepada negara-negara anggota ASEAN.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, ketidakmampuan ASEAN untuk mengambil kebijakan kolektif dalam merespons sengketa Laut Cina Selatan dihadapkan pada dua keterbatasan. Pertama, persepsi terhadap lingkungan eksternal yang meliputi nilai, sistem keyakinan dan kognisi masing-masing negara anggota ASEAN. Kedua, pengaruh ekonomi-politik yang bersumber dari kekuatan ekstra-regional terhadap masing-masing anggota ASEAN. Agenda integrasi ASEAN yang menjunjung tinggi otonomi organisasi dengan cara memelihara hubungannya dengan kekuatan eksternal dan mempertahankan netralitasnya secara kolektif menjadi tantangan terbesar ASEAN

untuk mewujudkan integrasi yang solid demi memelihara stabilitas politik-keamanan dan perdamaian kawasan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. Z. & Sani, M. A. (2017). China's Assertive Posture in Reinforcing its Territorial and Sovereignty Claims in the South China Sea: An Insight Into Malaysia's Stance. *Japanese Journal of Political Science*, 18 (1): 67-105.
- Alatas, S. M. (2016). The South China Sea and Energy Security: Malaysia's Reaction to Emerging Geopolitical Reconfigurations. *African and Asian Studies*, Vol. 15: 33-52.
- Bader, J., Lieberthal, K. & McDevitt, M. (2014). Keeping the South China Sea in Perspective. *The Foreign Policy Brief*. ____: Brookings Education.
- Baviera, A. S.P. (2017). The Philipines and the South China Sea Dispute: Security Interest and Perspectives dalam Storey, I.& Lin, C. Y. *The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tension*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Brady, M. (2017). *Mitigating Risk of US-Beijing conflict in South China Sea*. Diambil 11 April 2018 dari: <http://www.atimes.com/mitigating-risk-us-beijing-conflict-south-china-sea/>
- Chanborey, C. (2016). *The South China Sea and ASEAN Unity: A Cambodian Perspective*. Diambil 14 April 2019 dari: <https://thcasean.org/read/articles/268/The-South-China-Sea-and-ASEAN-Unity-A-Cambodian-Perspective>
- Christensen, T. J. (2003). China, the U.S. – Japan Alliance and the Security Dilema in East Asia, dalam Ikenberry, G. John & Mastanduno, Michael. *International Relations Theory and the Asia-Pacific*. New York: Columbia University Press.
- Cobus, P. (t.t) *Conflict and Diplomacy on the High Seas*. Diambil 21 Januari 2019 dari: <https://projects.voanews.com/south-china-sea/>
- Doan, X. L. (2019). Is Vietnam adopting a tough South China Sea posture?. Diambil 18 Januari 2019 dari: <http://www.atimes.com/is-vietnam-adopting-a-tough-south-china-sea-posture/>
- Firestein, D. J. (2016). *The US-China Perception Gap in the South China Sea*. Diambil 14 April 2019 dari: <https://thediplomat.com/2016/08/the-us-china-perception-gap-in-the-south-china-sea/>
- GBTimes. (26 May 2016). *What China, Phillipines, Vietnam and others say about South China Sea Arbitration*. Diambil 23 Januari 2019 dari: <https://gbtimes.com/what-china-philippines-vietnam-and-others-say-about-south-china-sea-arbitration>
- Hacke, J. (2005). Michael Leifer and the Balance of Power. *The Pacific Review*, 18 (1)

- Heydarian, R. J. (2018). *ASEAN under Duterte: Lost Opportunities on the South China Sea*. Diambil 22 Januari 2019 dari: <https://amti.csis.org/asean-under-duterte-lost-opportunities-scs/>
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the Security Dilema. *World Politics*, No. 30 (2): 167–174.
- _____. (2017). *Perception and Misperception in International Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Jones, W. S. & Rosen, S. J. (1982). *The Logic of International Relations* 4th Edition. Boston: Little, Brown and Company.
- Kaplan, R. D. (2015). *Why the south China Sea is so Crucial?*. Diambil 27 Desember 2018 dari: <https://www.businessinsider.com.au/why-the-south-china-sea-is-so-crucial-2015-2>
- Kurlantzick, J. (2011). *Growing U.S. Role in South China Sea*. Diambil 17 April 2018 dari: <https://www.cfr.org/expert-brief/growing-us-role-south-china-sea>
- Leifer, M. (1996). *The ASEAN Regional Forum*. London: Oxford University Press.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES
- Mourdoukoutas, P. (2019). *South China Sea: Vietnam Dares What Phillipines Didn't*. Diambil 23 Januari 2019 dari: <https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2019/01/02/south-china-sea-vietnam-dares-what-philippines-didnt/#3441b6f6149b>
- Nguyen, H. T. & Thanh, B. T. (2018). *Perspectives on the South China Sea Dispute in 2018*. Diambil 31 Desember 2018 dari: <https://www.nbr.org/publication/perspectives-on-the-south-china-sea-dispute-in-2018/>
- Noor, E. (2017). The South China Sea Dispute: Option for Malaysia. *The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tension*. Storey, I. & Lin, C. Y. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Overview of ASEAN-China Dialogue Relations. (2017). *ASEAN Secretariat Information Paper*, Jakarta: ASEAN Secretary.
- Parameswaran, P. (2017). *The Truth About China's Indonesia South China Sea Tantrum*. Diambil 18 April 2018 dari: <https://thediplomat.com/2017/09/the-truth-about-chinas-indonesia-south-china-sea-tantrum/>
- _____. (2016). Malaysia's Approach to the South China Sea Dispute after the Arbitral Tribunal's Ruling. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, No. 38 (3): 375-381.
- Poling, G. & Glaser, B. S. (2019). *How the U.S Can Step Up in the South China Sea*. Diambil 14 April 2019 dari: <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2019-01-16/how-us-can-step-south-china-sea>
- Qodarsasi, U. & Rachmawati, T. (2018). Upaya Cina Menjadi Kekuatan Maritim dalam Indian Association Rim (IORA). *Nation State: Journal of International Studies*,

- No. 1 (2): 145-146. Diambil 2 Januari 2019 dari: <https://journal.amikom.ac.id/index.php/nationstate/article/view/5272/pdf>
- Roach, J. A. (2014). Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South China Sea. *A CNA Occasional Paper*. United States: International Affairs Group Center for Strategic Studies.
- Schmitt, G. J. & Mazza, M. (2011). *Weakness of the ASEAN Way*. Diambil 14 April 2019 dari: <http://www.aei.org/publication/weakness-of-the-asean-way/print/>
- Scrafton, M. (2016). *The Security Dilemma and the South China Sea*. Diambil 7 Januari 2019 dari: <https://www.aspistrategist.org.au/security-dilemma-south-china-sea/>
- Thu, H. L. (2018). *Vietnam Should Update Its South China Sea Strategy*. Diambil 22 Januari 2019 dari: <https://amti.csis.org/vietnam-should-update-south-china-sea-strategy/>
- Tiezzi, S. (2018). *In Brunei, China Woos Rival South China Sea Claimant*. Diambil 7 Januari 2019 dari: <https://thediplomat.com/2018/11/in-brunei-china-woos-rival-south-china-sea-claimant/>
- Truong, T. D. & Knio, K. (t.t.). *The South China Sea and Asian Regionalism: A Critical Realist Perspective*. Germany: Springer.
- Tuan, H. A. (2017). A Vietnam Perspective on the South China Sea Dispute. *The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tension*. Storey, I. & Lin, C. Y. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Viray, P. L. (2018). *Vietnam asks Phillipines, China to stop escalating tension in South China Sea*. Diambil 23 Januari 2019 dari: <https://www.philstar.com/headlines/2018/06/04/1821552/vietnam-asks-philippines-china-stop-escalating-tension-south-china-sea>
- Zhen, L. (2018). *China and Brunei to step up Oil and Gas Development in Disputed South China Sea*. Diambil 7 Januari 2019 dari: <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2173959/china-and-brunei-step-oil-and-gas-development-disputed-south>